# NOTULENSI WORKSHOP PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KURIKULUM KKNI 2018 Jumat/26 April 2019

## Dosen yang hadir:

- 1. Dr. Indah Adi Putri., S.IP, M.IP
- 2. Dr. Aidinil Zetra., M. Si
- 3. Drs. Tamrin., MSi
- 4. Dr. Bakaruddin RA.,M.S
- 5. Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si
- 6. Dr. Tengku Rika Valentina, S.IP., MA
- 7. Sadri Chaniago, S.IP., M.Soc.sc
- 8. Didi Rahmadi, MA
- 9. Prof. Dr. Sri Zulchairiyah, MA
- 10. Zulfadli, S.H.I, M, Si

#### Dosen yang tidak hadir

- 1. Dr. Asrinaldi., M. Si (izin)
- 2. Mhd.Fajri,MA (izin)
- 3. Drs. Syaiful., M.Si (TB)
- 4. Irawati, S.IP.,M.IP (TB)
- 5. Andri Rusta, MPP (TB)
- 6. Doni Hendrik, S.IP., M.Soc.ac (TB)

#### Agenda:

Penyusunan dan Penetapan Kurikulum KKNI tahun 2018

NAMA	URAIAN	KETERANGAN
Indah	- Pada hari ini akan menyusun dan menetapkan mata kuliah KKNI 2018,supaya tidak ada perubahan lagi, karena akan berdampak terhadap pengisian KRS mahasiswa. Bagaimana cara kita membahas ini tanpa menghabiskan banyak waktu	
Bakaruddin	<ul> <li>Ini sudah masuk mata kuliah/semesterkah? Harusnya kita buat dulu tabelnya secara umum saja, kita list lagi mata kuliah seperti kurnas/inti dari jurusan ipol. Apsipol ada 10 mata kuliah dan wajib semuanya dan disebarkan pada setiap semester. Baru kemudian dibuat kurikulum local/muatan local, MKDU dan mata kuliah lainnya. Baru kemudian kita akan buat profil jurusan. Karena ada tumpang tindih mata kuliah</li> <li>Jadi penentuan profil mahasiswa ditekankan dari mata kuliah yang diambil.</li> <li>Mata kuliah yang memiliki kemiripan diberikan keterangan.</li> <li>Setiap dosen yang akan memberikan kuliah pengantar diberi pesan agar sesuai dengan tema mata kuliah.</li> </ul>	

	<ul> <li>Harusnya dibuat berdasarkan payung mata kuliah, isal untuk mata kuliah Pembangunan, harusnya dimulai dari teori pembangunan, pembangunan partisipatif, pembangunan daerah, pembangunan dan pembangunan masyarakat desa, baru kemudian pembangunan desa/nagari</li> </ul>	
Tamrin	- Sebaiknya mata kuliah pengantar disesuaikan dengan semestinya dan dipertajam melalui RPS.	
Sadri	<ul> <li>Apakah profil lulusan itu harus diakomodir dalam mata kuliah tertentu, tidak masuk akal juga mereka kita batasi berdasarkan profil</li> <li>Persoalannya kita tidak akan mengetahui mereka akan menjadi sesuai dengan profil yang ada</li> </ul>	
Tamrin	<ul> <li>Dalam penyusunan kurikulum berdasarkan profil/ profesi, universitas dan kurnas. Jadi tentu mata kuliah yang berdasarkan universitas yang akan kita lakukan terlebih dahulu</li> </ul>	
Sri Sul Chairiyah	<ul> <li>Berdasarkan kurikulum KKNI 2015, ada contoh profil lulusan yang benar dan salah, seperti birokrat dan pegawai negeri. Kita fokusnya ke kosentrasi atau ke profil. Meneurut kurikulum KKNI 2015 yang benar alah missal komunikator, kalau birokrat diganti dengan communicator leader. Profil lulusan harus sesuai dengan visi misi jurusan. Berdasarkan rapat jurusan kemaren kita hanya penyempurnaan lagi bukan mengulang dari awal lagi, kalau diulang dari awal akan memakan waktu yang lama</li> </ul>	
Didi	- Profil lulusan ini kita buat seingat saya supaya lebih operasional saja, ini sudah disepakati oleh jurusan. Saya melihat persoalan kita pada hari ini adalah tumpang tindih mata kuliah, ada juga pikiran kita ini merupakan mata kuliah kosentrasi. Tidak ada kewajiban untuk mengambil mata kuliah profil sampai tamat, tergantung mahasiswa ini akan menulis apa	
Indah	- Dengan adanya profil ini, mahasiswa seolah-olah dibatasi dalam mengambil mata kuliah, karena mahasiswa tersebut harus mengambil mata kuliah wajib profil dan kalau mau mengambil mata kuliah di profil lainnya, itu menjadi pilihan bagi mahasiswa tersebut, ini akan membatasi mahassiwea untuk menambah pengetahuan mereka untuk mengerjakan tugas akhir, karena satu profil dengan profil yang lainnya pada saat membuat proposal penelitian juga berhubungan satu dengan yang lainnya	
Sri	<ul> <li>Semua mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang ada pada semua profil lulusan</li> </ul>	

Bakaruddin	- Harus ada mata kuliah semuanya, untuk dilakukan penyempurnaan, karena berdasarkan profil akan menghambat mahasiswa untuk berkembang	
Aidinil Zetra	- Dalam KKNI ada dua jenis keilmuan, praktis dan murni. Persoalannya ilmu politik adalah ilmu murni, maka akan sulit kita menentukan mata kuliah, sehinga kita tidak bias dikotak-kotakan hanya dalam satu profil saja, berbeda dengan teknik misalnya	
Bakaruddin	<ul> <li>Mata kuliah dalam kurikulum kita sudah seperti judul buku, makanya apakah nomenklatur mata kuliah ini memang kita perlukan atau kita akan rubah sesuai dengan kebutuhan kita, terutama kurikulum inti</li> <li>Kita harus menyusun terlebih dahulu mengenai namanama mata kuliah yang sama, kita buat payung nya dulu, seperti mata kuliah yang tergabung dalam kebijaka public atau pembangunan</li> <li>Misal mata kuliah Pengantar Kebijakan Pulik dan Analisis Kebijakan Publik, harus ada pelaksanaan kebiakan public, evaluasi baru kemudian ada Advokasi Kebijakan Publik</li> <li>Kita perlu persetujuan untuk membuang atau</li> </ul>	
T 1 1	memarger mata kuliah yang ada	
Indah	- Ada tumpang tindih nama mata kuliah dan materi kuliah, dan ada juga penyebutan mata kuliah yang sama pada kurikulum lama	
Bakaruddin	- Mata Kuliah yang digabung : Desentralisasi dan Otonomi Daerah digabung ke mata kuliah Politik Desentralisasi	
Didi	- Untuk mata kuliah pembangunan : Teori Pembangunan dan Pembangunan Partisipatif	
Aidinil	- PKP tidak masalah tetapi harus ada analisis KP nya	
Tamrin	<ul> <li>Ditambahkan Teori Kebijakan Publik</li> <li>Untuk mata kuliah Marketing politik dan Personal Branding, dibuang saja personal branding</li> </ul>	
Sadri	- Untuk mata kuliah pemilu dijadikan 3 : Aspek tentang kepemiluan, kepartaian dan marketing/kampanye	
Indah	<ul> <li>Jadi dari usulan tadi, kita akan membuat list mata kuliah yang sudah ada dalam kurikulum KKNI 2018, kita akan kelompokan, dan koreksi bersama mana mata kuliah yang kira-kira RPS dan materinya sama, maka akan di gabung atau dihilangkan saja</li> <li>Dan untuk profil kita tidak sebutkan lagi dalam penawaran mata kuliah ke fakultas, cukup PA mengarahkan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang disesuaikan dengan minat dan proposal penelitian mereka</li> </ul>	

### **Kesimpulan Rapat:**

- 1). Untuk Mata kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah digabung ke mata kuliah Politik Desentralisasi
- 2). Untuk mata kuliah pembangunan di bagi menjadi dua mata kuliah yaitu : Teori Pembangunan dan Pembangunan Partisipatif
- 3). Untuk Mata Kuliah Kebijakan menjadi : Pengantar Kebijakan Publik, dan Analisis Kebijakan Publik
- 4). Untuk Mata Kuliah Pemilu di bagi menjadi: Partai Politik dan Pemilu Indonesia, Marketing Politik, Tata Kelola Pemilu, Pemilih dan Prilaku Memilih
- 5). Untuk mata kuliah Demokrasi : Demokrasi dan Demokratisasi
- 6). Untuk mata kuliah governance : Teori Governance, Integritas dan Anti Korupsi, Birokrasi dan politik, E-Government, Good governance and Clean Government
- 7). Mata Kuliah Politik secara umum di gabung dan dibagi menjadi mata kuliah: Filsafat Politik Minangkabau, Politik Pemerintahan Desa Nagari, Legal Drafting, Teori Gerakan Sosial, Politik Lingkungan, Politik Kawasan, Konflik dan Konsesnsus, Perempuan dan Politik, Politics and Human Security, Politik Identitas dan Multikuralisme, Politik Perkotaan dan Pedesaan, Kekuatan Politik, Etika Politik, Jurnalistik, Komunikasi Politik, Antropologi Politik, Kepemimpinan Politik dan Pemerintahan, Seminar Isu-Isu Politik Lokal, Seminar Isu-Isu Politik Indonesia, Seminar Isu-Isu Politik Islam, Seminar Isu-Isu Perbandingan Politik, Seminar Isu-Isu Governnace
- 8). Metodologi: Pengantar Filsafat Ilmu, Metodologi Ilmu Politik, MIP kualitatif dan MIP Kuatitatif, Statistik Sosial, Teori Politik I (Klasik) dan Teori Politik 2 (Modern)
- 9). Politik Islam menjadi: Pemikiran Politik Islam, Teori Politik Islam, Islam di Minangkabau, Isu-Isu Politik Islam, Dinamika Politik Islam
- 10).MKWU menjadi : Agama, Kewarganegaraan, Pancasila, Bahasa Indo dan Penulisan Ilmiah, Bahasa Inggris
- 11).KKN, Proposal dan Skripsi
- 12). Diusulkan dalam penawaran mata kuliah tidak ditampilkan keterangan tentang profil lulusan, hanya nama mata kuliah saja. Profil hanya dituliskan dalam struktur kurikulum KKNI tahun 2018
- 13). Pembahasan lanjutan untuk pembagian mata kuliah wajib dan pilihan, jumlah SKS per mata kuliah serta pengesahan kurikulum KKNI tahun 2018 ini akan dadakan pada: Hari Jumat/3 Mei 2019, jam 08.30 WIB- Selesai bertempat di Kampus Pasca Sarjana FISIP Jati

Notulen,

Dewi Anggraini, S.IP.,M.Si